

# KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN UNTUK Mendukung PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) (STUDI KASUS KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH)

<sup>1</sup>Suhartono , <sup>2</sup>Mohamad Siarudin

<sup>1,2</sup> Balau Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry, Jl. Raya Ciamis-Banjar km 4, Ciamis,  
Jawa Barat 46271

e-mail: <sup>1</sup>om\_hartono@yahoo.com, <sup>2</sup>msiarudin@yahoo.com

*Abstrak.* Hutan memiliki peranan penting dalam konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran potensi hutan dan merumuskan strategi pembangunan hutan yang mendukung sistem pengelolaan DAS. Kajian dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar yang merupakan bagian dari wilayah DAS Solo. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Karanganyar telah memberi kontribusi ekonomi, ekologi dan sosial. Arah pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Karanganyar terbagi dalam 5 katagori yaitu kawasan untuk konservasi, kawasan untuk perlindungan, kawasan untuk pengusahaan, hutan rakyat untuk perlindungan dan hutan rakyat untuk budidaya. Strategi pembangunan kehutanan untuk meningkatkan daya dukung DAS antara lain: 1) pemberian insentif untuk mendorong investasi hijau pada kawasan konservasi dan perlindungan; 2) optimasi pemanfaatan jasa lingkungan dan pengembangan HHBK pada kawasan dengan fungsi konservasi dan perlindungan; 3) penanaman kembali/pengkayaan dengan jenis yang sesuai pada kawasan konservasi dan perlindungan; 4) perlindungan tanaman dan peningkatan penegakan hukum 5) peningkatan produk hasil hutan melalui pengembangan komoditas strategi kehutanan pada kawasan produksi maupun hutan rakyat; 6) meningkatkan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

**Kata kunci:** DAS, hutan, konservasi, pembangunan, strategi

## 1. Pendahuluan

Hutan mempunyai tiga fungsi pokok yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung serta fungsi produksi. berdasarkan fungsinya, hutan terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi (Undang-undang nomor 41 tahun 1999). Sebagai sumber kehidupan, hutan memberikan manfaat secara ekonomi, sosial budaya dan manfaat ekologi. Hutan berperan penting dalam mengkonservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) karena hutan mempunyai sifat meredam tingginya debit sungai pada musim hujan dan berpotensi memelihara kestabilan air sungai pada musim kemarau (J. Riujter dan F. Agus 2004).

Sebagai fungsi perlindungan, luas hutan harus lebih dari 30% luas DAS dan sebagai faktor pengendali aliran luasnya harus lebih dari 50% luas DAS (Pudjiharta, 2008). Beberapa DAS di Pulau Jawa mengalami penurunan kondisi yang indikasinya ditunjukkan dengan meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi, sedimentasi, banjir dan kekeringan. Kondisi dan kelestarian DAS dipengaruhi oleh perilaku, keadaan sosial-ekonomi dan pola pemanfaatan lahan oleh manusia. Oleh karena itu menurut Paimin *et al* (2012), pengelolaan lahan yang produktif dengan memperhatikan asas konservasi dan

ekologi tata air perlu disusun dalam suatu sistem perencanaan pengelolaan DAS sebagai bentuk perencanaan pembangunan sumberdaya alam (vegetasi, tanah, air).

Kabupaten Karanganyar termasuk dalam wilayah DAS Solo, sebagian wilayahnya merupakan kawasan pegunungan yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi beberapa kali musibah banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo. Kejadian ini menjadi indikator telah terjadi penurunan fungsi kawasan resapan air di wilayah DAS Solo bagian hulu termasuk sebagian wilayah Karanganyar. Pola pemanfaatan lahan yang kurang memperhatikan kaidah konservasi diduga menjadi salah satu penyebab sering terjadinya peristiwa tanah longsor dan banjir.

Kegiatan pembangunan kehutanan di Kabupaten Karanganyar telah dilakukan dari tahun ke tahun dengan berbagai kegiatan penanaman dan pembuatan bangunan konservasi. Namun peristiwa tanah longsor dan banjir masih terjadi saat musim hujan tiba. Lemahnya koordinasi antar instansi kehutanan di daerah dan pusat dalam penyelenggaraan urusan kehutanan sering mengakibatkan terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan, proyek kurang tepat sasaran dan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena di daerah belum memiliki arahan yang jelas tentang rencana strategis pembangunan kehutanan tingkat kabupaten.

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran potensi hutan dan merumuskan strategi pembangunan hutan yang mendukung sistem pengelolaan DAS di Kabupaten Karanganyar. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun strategi pembangunan kehutanan untuk mendukung sistem pengelolaan DAS secara lebih optimal sesuai daya dukung wilayah.

## 2. Potensi Wilayah Kabupaten Karanganyar

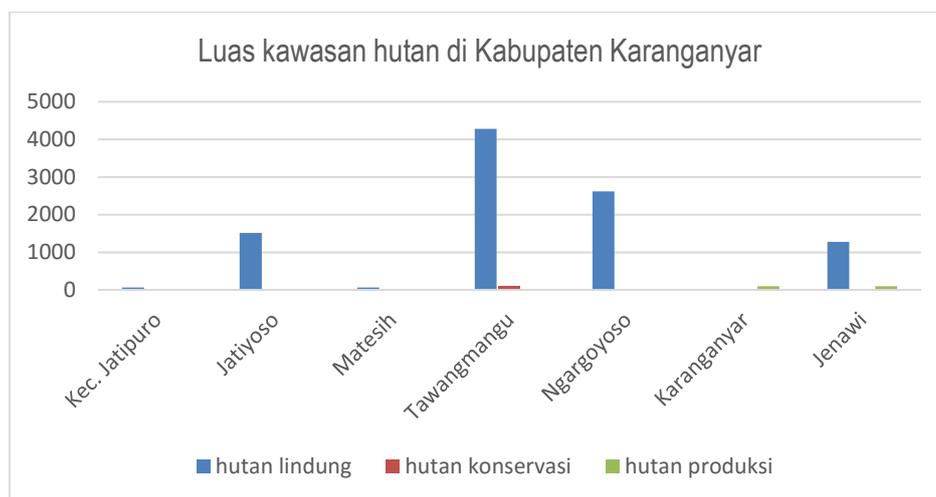
Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah DAS Solo. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar 77.378,64 Ha terdiri dari lahan sawah 22.459,80 Ha dan lahan kering 54.917,84 Ha. Rata-rata ketinggian wilayah berada di atas permukaan laut (dpl) 511 m. Jenis tanah di Kabupaten Karanganyar terdiri dari litosol, andosol, mediteran, aluvial, grumosol dan regosol. Berdasarkan data 6 stasiun pengukur yang ada di Kabupaten Karanganyar, banyaknya hari hujan selama tahun 2014 adalah 115,6 hari dengan rata-rata curah hujan 7.231,4 mm dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Februari dan April. Sedangkan yang terendah pada Agustus dan September (BPS Kabupaten Karanganyar, 2015).

**Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Kabupaten Karanganyar Sesuai Fungsinya**

Kecamatan	Kawasan/Fungsi			Jumlah Ha
	Hutan Lindung Ha	Hutan Konservasi Ha	Hutan Produksi Ha	
Jatipuro	63,31	0	0	63,31
Jatiyoso	1.511,13	0	0	1511,13
Matesih	60,07	0	0	60,07
Tawangmangu	4.280,96	90,87	0	4371,83
Ngargoyoso	2.614,08	0	0	2614,08
Karanganyar	0	0	96,29	96,29
Jenawi	1.279,48	0	98,28	1377,76
Jumlah	9.809,03	90,87	194,57	10.094,47

Sumber : Balai KSDA Jawa Tengah, 2015

Areal hutan di Kabupaten Karanganyar terdiri dari hutan negara dan hutan rakyat. Tabel 1 menunjukkan bahwa keberadaan hutan di Karanganyar memiliki peranan penting terhadap kondisi DAS karena >90% luas kawasan hutan merupakan kawasan lindung. Selain kawasan hutan, di Kabupaten Karanganyar terdapat lahan hutan rakyat yang luasnya mencapai kurang lebih 16.322 Ha tersebar di 17 Kecamatan dengan hutan rakyat terluas di Kecamatan Jatiyoso dan terkecil di Kecamatan Colomadu (BPS Kabupaten Karanganyar, 2015).



**Gambar 1. Diagram Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Karanganyar**

### 3. Kontribusi Sektor Kehutanan di Kabupaten Karanganyar

Struktur ekonomi di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh 4 sektor yang memberi kontribusi terhadap PDRB kabupaten antarlain sektor pertanian (termasuk kehutanan) 18,82%, industri pengolahan 52,25 %, sektor perdagangan 10,67%, sektor jasa dan lainnya 18,26% (BPS Kabupaten Karanganyar, 2015). Kontribusi ekonomi sektor kehutanan di Kabupaten Karanganyar bersumber dari produksi kayu dan non kayu baik yang berasal dari hutan negara maupun hutan rakyat. Produksi hasil hutan dari hutan negara memberi kontribusi pada penerimaan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH). Menurut data pada Dinas Pertanian Tahun 2013, dana bagi hasil PSDH yang disalurkan ke Kabupaten Karanganyar mencapai Rp. 319.485.536. Selain produksi kayu dan non kayu, pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan di Kabupaten Karanganyar juga mampu menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Tahun 2013 Penerimaan PNBP yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan mencapai Rp. 942.784.000.

Kabupaten Karanganyar memiliki banyak sumber mata air baku yang sebagian telah dikelola oleh PDAM. Potensi pemakaian air terbesar terjadi pada Tahun 2012 sebesar 37.830 pelanggan, dengan jumlah pemakaian air sebanyak 8.532.975 m<sup>3</sup> dan nilai pemakaian Rp. 24.150.279.150. Jumlah kebutuhan air bersih akan semakin bertambah tiap tahunnya seiring dengan perkembangan penduduk. Hal ini perluantisipasi dan strategi pengelolaan kawasan yang tepat untuk melindungi kawasan sekitar mata air (BPS Kabupaten Karanganyar, 2015).

Kontribusi sektor kehutanan dalam aspek sosial budaya antara lain dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Di Kabupaten Karanganyar

terdapat beberapa Lembaga Masyarakat Disekitar Hutan (LMDH) dibawah binaan KPH Surakarta. Kegiatan PHBM telah membuka akses pada masyarakat untuk ikut mengelola sumber daya hutan dan berkontribusi langsung pada pendapatan petani melalui mekanisme sharing produksi hasil hutan. Hal ini tergambar melalui kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2014 yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Tabel 2).

**Tabel 2. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar (atas dasar harga konstan)**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
Sektor kehutanan	Rp (juta)	5.318,2	5.578,8	5.803,24	5.843,86	6.008,31

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2015

#### 4. Kelembagaan Sektor Kehutanan

Pengurusan sumberdaya hutan di Kabupaten Karanganyar ditangani oleh beberapa instansi antara lain: diluar kawasan hutan ditangani oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar, pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung ditangani oleh Perum Perhutani KPH Surakarta dan pengelolaan kawasan hutan konservasi ditangani oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Tengah. Urusan sektor kehutanan yang menyangkut pengelolaan DAS ditangani oleh Balai Pengelolaan DAS Solo.

Kelembagaan kehutanan di masyarakat diwadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lainnya.

#### 5. Peran Hutan di Kabupaten Karanganyar terhadap Ekosistem DAS

DAS merupakan ruang di mana sumberdaya alam, terutama vegetasi, tanah dan air, berada dan tersimpan serta tempat hidup manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (UU No. 7 Tahun 2004). Menurut Paimin, et al. (2012) DAS merupakan satuan wilayah alami yang memberikan manfaat produksi serta memberikan pasokan air melalui sungai, air tanah, dan atau mata air, untuk memenuhi berbagai kepentingan hidup, baik untuk manusia, flora maupun fauna. Untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan perlu disusun sistem perencanaan pengelolaan DAS yang obyektif dan rasional.

Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan untuk mencukupi sebagian kebutuhan hidup manusia. Adanya tanaman hutan yang luas dan kerapatan normal akan mempertinggi kemampuan hutan dalam mencegat (interception) air hujan oleh penambahan tajuk hutan (Pudjiharta, 2008). Hutan mempunyai sifat meredam tingginya debit sungai pada musim hujan dan berpotensi memelihara kestabilan air sungai pada musim kemarau (J. Riujter dan F. Agus, 2004). Oleh karena itu diperlukan Perencanaan pengelolaan DAS sebagai bentuk perencanaan pembangunan sumberdaya alam (vegetasi, tanah, dan air) dengan menggunakan satuan atau unit pengelolaan daerah

tangkapan air (catchment area) atau daerah aliran sungai dengan bagian-bagian wilayahnya (Paimin et al, 2012).

Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari DAS Solo yang memiliki peranan sangat penting karena sebagian wilayahnya merupakan kawasan perlindungan yang berfungsi sebagai area resapan air. Baik buruknya kualitas air di Sungai Bengawan Solo akan dipengaruhi oleh kondisi area resapan air yang ada di bagian DAS hulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Junaedi dan Tarigan (2016) bahwa proses sedimentasi pada aliran sungai merupakan kelanjutan dari proses erosi yang terjadi pada penggunaan lahan yang terdapat di sekitar daerah tangkapan sungai tersebut. Oleh karena itu agar lahan dapat memberi kontribusi manfaat yang optimal diperlukan suatu strategi perencanaan dan pengaturan pemanfaatan lahan yang jelas untuk mendukung sistem pengelolaan DAS yang lebih baik.

## 6. Strategi Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Karanganyar

Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu “Bersama Memajukan Karanganyar “. Sektor kehutanan harus mempunyai peran aktif memajukan Kabupaten Karanganyar dengan cara meningkatkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan strategi perencanaan jangka panjang untuk pengelolaan urusan kehutanan.

### 6.1 Pemanfaatan ruang kawasan hutan

Kriteria penentuan arahan rencana pembangunan kehutanan di Kabupaten Karanganyar harus mengacu pada pemanfaatan ruang kawasan hutan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Tengah. Data luas arahan indikatif rencana pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Karanganyar sebagaimana pada Tabel 3.

**Tabel 3. Luas Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Kabupaten Karanganyar**

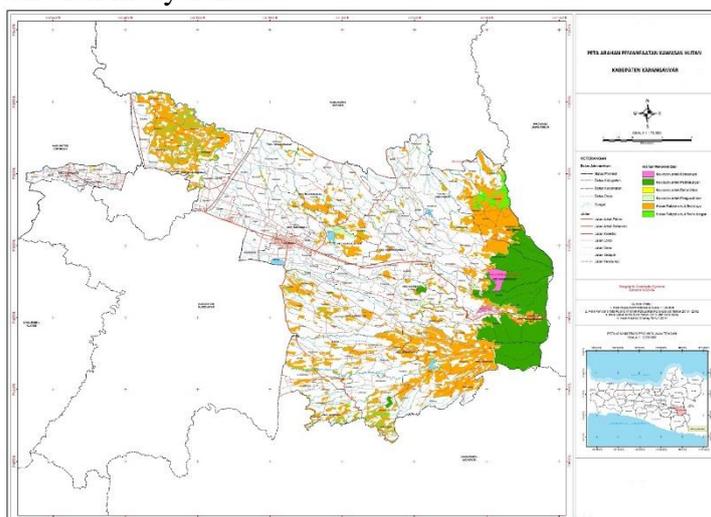
No	Arahan pemanfaatan	Luas (Ha)
1.	Kawasan untuk Konservasi	295,60
2.	Kawasan untuk Pengusahaan	259,00
3.	Kawasan untuk Perlindungan	7.312,00
4.	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	1.504,85
5.	Hutan Rakyat untuk Budidaya	15.182,363
Total Luas Hutan		31.217,69

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Jateng (2015)

Dalam Permenhut P.36/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota dijelaskan beberapa kriteria arahan pemanfaatan kawasan hutan. Kawasan untuk konservasi adalah seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi yang diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan yang pengelolaannya harus tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan berdasarkan zonasi yang ditetapkan. Kawasan untuk pengusahaan adalah kawasan hutan produksi atau produksi terbatas dengan kriteria potensial kritis dan tidak kritis yang berada di hulu, tengah dan hilir DAS, dan bukan areal pertambangan, mempunyai tujuan utama untuk pengusahaan hutan dimana peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan sangat diharapkan untuk kawasan ini. Kawasan untuk perlindungan adalah kawasan hutan lindung, sempadan sungai dan resapan air di kawasan hutan yang

diarahkan untuk perlindungan hidroorologis, *carbon stock*, pemanfaatan terbatas dapat dilakukan tanpa meninggalkan tujuan utamanya

Luas pemanfaatan kawasan terbesar di Kabupaten Karanganyar diarahkan untuk hutan rakyat yang terbagi pada dua kriteria fungsi yaitu perlindungan dan budidaya. Hutan rakyat untuk perlindungan adalah area di luar kawasan hutan dengan kriteria kawasan lindung fisiografis, kawasan resapan air, sempadan sungai/saluran, sempadan pantai, sempadan danau/ waduk, dan kawasan lindung serta area di luar kawasan hutan yang rawan bencana longsor yang diarahkan untuk perlindungan hidroorologis dan penyerapan karbon. Pemanfaatan secara terbatas dapat dilakukan melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat. Hutan rakyat untuk budidaya adalah area diluar kawasan hutan berupa hutan tanaman, pertanian lahan kering atau pertanian lahan kering campur semak dalam wilayah DAS dengan kriteria agak kritis, kritis, sangat kritis, potensial kritis dan tidak kritis yang berada di hulu, tengah dan hilir DAS. Area ini diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya. Wilayah ini dapat diarahkan untuk pengusahaan hutan oleh masyarakat.



**Gambar 2. Peta Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Karanganyar**

## 6.2 Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

Visi pembangunan kehutanan di Karanganyar mendatang dapat diwujudkan dengan memperhatikan dan mengenali kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam pengelolaan sumber daya hutan sehingga diketahui masalah yang dihadapi dan tindakan memaksimalkan kekuatan dan mengoptimalkan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman.

Faktor kekuatan dan kelemahan seringkali berasal dari internal, merupakan aspek regulasi dan birokrasi. Beberapa faktor tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan kehutanan. Faktor yang menjadi kekuatan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Karanganyar antara lain : eksistensi instansi kehutanan; potensi kayu dari hutan rakyat dan pasar hasil hutan yang cukup baik; potensi hutan sebagai obyek wisata dan akses transportasi ke kawasan hutan yang cukup baik; peran serta dan akses masyarakat terhadap hutan; dan tanah yang relatif subur. Sebaliknya yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan kehutanan di Kabupaten Karanganyar adalah: perencanaan

pengelolaan DAS belum terpadu dan minimnya database potensi sumber daya hutan terkini; pemanfaatan hutan masih terbatas pada hasil hutan kayu (*timber management*); rendahnya implementasi hasil penelitian dan iptek; terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dan lemahnya implementasi tupoksi kelembagaan;

Peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan kehutanan dari aspek regulasi, infrastruktur dan kemasyarakatan. Hal-hal yang menjadi peluang dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Karanganyar adalah: dukungan pemerintah melalui kebijakan; potensi pengembangan obyek wisata alam dan jasa lingkungan; tingginya permintaan pasar terhadap hasil hutan kayu; dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan; diversifikasi produk hasil hutan kayu. Sebaliknya hal-hal yang menjadi faktor ancaman untuk pembangunan kehutanan di Kabupaten Karanganyar antara lain: masih adanya praktik *illegal logging*, pengaturan rotasi penebangan kayu rakyat, sedimentasi dan erosi; tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang belum merata; dan konflik kepentingan sektoral yang cukup tinggi;

Dengan melihat faktor-faktor kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman seperti yang diuraikan diatas maka posisi penyelenggaraan pengelolaan hutan di Karanganyar masih dapat dioptimalkan melalui perencanaan dan program yang mengarah pada bentuk strategi perubahan dengan cara memperbaiki kelemahan dan mengembangkan kekuatan untuk mengambil peluang yang ada.

### 6.3 Kebijakan dan strategi pengelolaan hutan

Analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Karanganyar menghasilkan luas arahan pemanfaatan kawasan hutan antara lain : kawasan untuk konservasi 295,60 Ha, kawasan untuk perlindungan 7.312 Ha dan kawasan untuk pengusahaan mencapai 259 Ha. Berdasarkan data luas arahan pemanfaatan kawasan hutan dapat dirumuskan berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan.

Strategi perlindungan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum. Pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar untuk menjaga keseimbangan ekologis. Pemanfaatan kawasan konservasi diarahkan pada pengembangan produk-produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pemantapan kelembagaan unit pengelolaan kawasan konservasi harus didukung dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan. Dengan demikian pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Karanganyar kedepan harus didukung pemantapan pengelolaan yang meliputi perencanaan, kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan.

Kawasan perlindungan berfungsi sebagai penyangga kehidupan bagi ekosistem di bawahnya untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Mengingat pentingnya fungsi kawasan perlindungan, maka pemanfaatannya dilakukan secara terbatas. Strategi pemanfaatan yang sesuai untuk kawasan ini antara lain : pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu; reboisasi dan atau pengkayaan dengan jenis-jenis yang sesuai untuk perlindungan DAS (perakaran dalam, tingkat *evapotranspirasi* rendah dan menghasilkan hasil hutan non kayu).

Arahan pemanfaatan kawasan untuk pengusahaan harus bertujuan untuk peningkatan produktivitas kawasan hutan produksi dalam memenuhi bahan baku kayu

dan pengembangan ekonomi rakyat. Strategi pengelolaan kawasan dapat dilakukan dengan sistem pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL); pengembangan jenis unggul dan *fast growing species* yang berorientasi kebutuhan pasar; intensifikasi produk dan peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu; pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat.

#### **6.4 Kebijakan dan strategi pengelolaan hutan rakyat**

Hasil analisis spasial, arahan pemanfaatan hutan rakyat di Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi dua katagori yaitu hutan rakyat untuk perlindungan 1.504,85 Ha dan hutan rakyat untuk budidaya 15.182,36 Ha. Areal hutan rakyat untuk perlindungan terdiri dari lahan yang agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Aktivitas pengelolaan lahan yang intensif pada kawasan ini sangat rentan terhadap terjadinya longsor dan erosi. Kegiatan pemulihan kawasan harus diarahkan untuk mengembalikan fungsi perlindungan bagi daerah dan lebih banyak menyerap karbon. Strategi pengelolaan yang dapat dilakukan antara lain : pemanfaatan secara terbatas hanya ditujukan untuk perlindungan kawasan di bawahnya dan pengatur tata air; fasilitasi modal kepada masyarakat untuk pemanfaatan lahan dibawah tegakan (*agroforestry*), pengembangan produk bukan kayu dan jasa lingkungan; penanaman jenis yang mempunyai perakaran dalam, tingkat *evapotranspirasi* rendah, dan menghasilkan produk utama bukan kayu (HHBK) serta penanaman rumput penguat teras. Pola penanaman agroforestri sangat tepat diterapkan dalam area ini karena penanaman agroforestri dapat memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap jasa lingkungan untuk mempertahankan fungsi hutan dalam mendukung DAS (Noordwijk et al, 2004).

Luas arahan hutan rakyat untuk budidaya di Kabupaten Karanganyar adalah 15.182,36 Ha. Areal ini diupayakan memiliki produktivitas optimal sebagai pemasok bahan baku kayu. Upaya rehabilitasi lahan dapat dikembangkan sesuai morfologi DAS dengan mempertimbangkan faktor biofisik, sosial ekonomi dan kearifan lokal yang ditengarai mempengaruhi sistem usaha tani yang ada. Strategi pemanfaatan lahan pada areal ini dapat dilakukan dengan penanaman jenis tanaman yang sesuai lahan dan kondisi biofisik sesuai keinginan masyarakat sebagai pemilik lahan; kegiatan rehabilitasi lahan pada daerah hulu dengan jenis yang memiliki perakaran dalam disertai teknik konservasi tanah; rehabilitasi lahan pada DAS tengah dan hilir dengan jenis vegetasi yang dapat memperbaiki kondisi tanah, bernilai ekonomi tinggi dengan kegiatan teknik sipil sesuai kebutuhan. Kegiatan penghijauan dan atau pengkayaan dapat dilakukan dengan pengembangan jenis cepat tumbuh, bernilai ekonomis, pembudidayaan mudah dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengembangan pola tanam *agroforestry* sangat dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas lahan agar memberikan tambahan pendapatan bagi petani.

### **7. Kesimpulan dan Saran**

Hutan di Kabupaten Karanganyar memiliki peran yang penting dan telah berkontribusi pada sosial ekonomi masyarakat, serta berperan dalam menjaga ekosistem DAS dengan luasan sebagian besar (90%) berupa kawasan lindung. Pengelolaan hutan di Kabupaten Karanganyar sudah dilakukan tetapi masih diperlukan arahan yang lebih jelas dalam bentuk rencana jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan strategi pembangunan untuk mendukung sistem pengelolaan DAS.

Arahan pemanfaatan lahan di Karanganyar dibagi kedalam 5 katagori antara lain: kawasan untuk konservasi, kawasan untuk pengusaha, kawasan untuk perlindungan, hutan rakyat untuk perlindungan dan hutan rakyat untuk budidaya. Berdasarkan arahan luasan pemanfaatan kawasan dapat dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan yang mendukung sistem pengelolaan DAS secara garis besar: a) pemberian insentif/disinsentif untuk mendorong investasi hijau pada kawasan konservasi dan perlindungan; b) optimasi pemanfaatan jasa lingkungan dan pengembangan HHBK pada kawasan dengan fungsi konservasi dan perlindungan; c) penanaman kembali/pengkayaan dengan jenis yang sesuai pada kawasan konservasi dan perlindungan; d) perlindungan tanaman dan peningkatan penegakan hukum; e) peningkatan produk hasil hutan melalui pengembangan komoditas strategi kehutanan pada kawasan produksi maupun hutan rakyat; f) meningkatkan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian ini, dapat direkomendasikan agar disusun Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTk) sesuai amanat Permenhut No. P.36/Menhut-II/2013, sehingga pembangunan kehutanan dapat lebih terarah. Walaupun urusan kehutanan sudah tidak ditangani pemerintah kabupaten sesuai UU No. 23 Tahun 2014, masih ada harapan kepada pemerintah provinsi untuk dapat menyelenggarakan urusan kehutanan yang sejalan dengan rencana pengelolaan DAS.

## Daftar pustaka

- BPS Karanganyar. 2015. Karanganyar Dalam Angka 2015. BPS Karanganyar. Karanganyar
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 2014. Statistik Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Semarang
- Dinas Pertanian Tanbunhut Kabupaten Karanganyar. 2015. Laporan Rekapitulasi Pembayaran Iuran Kehutanan/PSDH Tahun 2015. Dinas Pertanian Tanbunhut Kabupaten Karanganyar. Karanganyar
- Junaidi, E., & Maryani, R. 2013. Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi pada suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap Keberadaan Lanskap Hutan (Studi Kasus pada DAS Citanduy Hulu dan DAS Ciseel, Jawa Barat). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 122-239.
- Pudjiharta, A. 2008. Pengaruh Pengelolaan Hutan pada Hidrologi. *Info Hutan*, 5(2), 141-150.
- Paimin, Pramono, I. B., Purwanto, & Indrawati, D. R. (2012). *Sistem perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai*. H. Santoso, & D. Pratiwi (Eds.). Kementerian Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi.
- Permenhut P.36/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota.
- Rangkuti, F. 1998. Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis. Gramedia Pustaka Utama.
- Riujter, J dan Agus, F. 2004. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). [www.worldagroforestry.org](http://www.worldagroforestry.org). Diakses pada 13 Agustus 2016.
- Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- van Noordwijk, M., Agus, F., Suprayogo, D., Hairiah, K., Pasya, G., Verbist, B., & Farida, A. (2004). Peranan agroforestri dalam mempertahankan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS). Word Agroforestry Center.